

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi perdagangan telah mendorong setiap negara untuk melakukan perdagangan secara terbuka dan lebih meluas ke negara-negara lain. Keterbukaan perdagangan dilihat dari proporsi nilai total ekspor dan impor terhadap PDB suatu negara. selain itu, keterbukaan perdagangan ini juga ditandai dengan adanya pembebasan terhadap hambatan-hambatan dalam perdagangan baik tarif maupun non-tarif.

Perekonomian Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka yang ditandai dengan adanya perpindahan arus barang dan jasa (ekspor-impor) sertamodal/investasi dan portofolio. Namun sistem ekonomi Indonesia yang bersifat terbuka telah menjadikan Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh situasi perekonomian global. Selain itu, *shock eksternal* juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi internal pada ekonomi terbuka kecil. Perekonomian Indonesia tidak bisa terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di perekonomian global, baik secara positif maupun negatif. Seperti pada krisis 1997, efek domino dari thailand, serta krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang berimbas pada menurunnya perekonomian Indonesia.

Berbagai indikator perekonomian menunjukkan bahwa krisis perekonomian global telah memberikan dampak yang cukup besar bagi kinerja perekonomian di

dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dikarenakan melambatnya konsumsi rumah tangga. Begitu juga dengan investasi yang melambat akibat menurunnya permintaan eksternal serta meningkatnya faktor resiko ketidakpastian perekonomian dunia. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekspor menjadi melambat sehingga pertumbuhan impor akan tertahan yang berimbas pada cadangan devisa. Data BPS Agustus 2013 menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 12,77% di bulan Agustus 2013 dari nilai Juli 2013, yakni dari US\$ 15,08 Miliar per Juli menjadi hanya sekitar US\$ 13,16 Miliar per Agustus. Bahkan, Asian Development Bank (ADB) telah mengoreksi pertumbuhan GDP Indonesia di tahun 2013 yang sebelumnya sebesar 6,4% terkoreksi menjadi 5,7%, turun sebesar 0,7%. Hal ini akan semakin menurunkan daya saing Indonesia.

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki cadangan devisa yang tidak cukup tangguh untuk mengatasi masalah krisis perekonomian ini, sehingga diperlukan bantuan asing berupa hutang luar negeri agar pertumbuhan dan pembangunan nasional tetap meningkat. Dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama satu tahun tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain (Mankiw, 2008).

Pinjam meminjam uang (hutang) antar negara merupakan salah satu bentuk hubungan perekonomian secara lintas negara yang kini lazim

dilakukan. Hubungan tersebut dijalankan dengan harapan agar saling menguntungkan. Kasus yang sering dijumpai adalah negara berkembang meminjam dana kepada negara maju dengan tujuan sebagai penunjang pembangunan Negara berkembang. Dalam hal ini negara berkembang mendapat suntikan dana untuk memperlancar pembangunan dan negara maju dapat menyalurkan kredit sebagai bentuk langkah investasi masa depan. Selain itu pinjaman luar negeri juga dibutuhkan untuk menutup *saving investment gap*, yaitu kesenjangan antara tabungan dalam negeri dengan dana investasi.

Dalam beberapa dekade terakhir kebijakan pinjaman luar negeri Indonesia selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem keuangan negara. Jika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada anggaran yang diterimanya, maka pinjaman (hutang) dapat dimasukkan kedalam sisi penerimaan anggaran sehingga pemerintah tetap bisa melanjutkan aktivitas pembangunan. Hal ini menyebabkan kondisi pinjaman luar negeri Indonesia hingga saat ini telah mencapai jumlah yang sangat besar dan cukup memprihatinkan.

Posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir 2003 sudah mencapai US\$ 80,91 miliar dan jika digabungkan dengan swasta, maka total hutang luar negeri akan mencapai 55% dari PDB atau 222% dari total ekspor. Angka rasio hutang ini masih relatif diatas ambang batas aman bagi negara berkembang, dimana rasio beban hutang masih tergolong tinggi, yaitu 31% dari total ekspor pemerintah Indonesia pada tahun 2003. Seiring berjalannya waktu perekonomian Indonesia semakin membaik, karena berhasil mempercepat pelunasan hutang kepada IMF sebesar US\$ 7,8 miliar pada tahun 2006 yang dimana seharusnya hutang tersebut baru lunas tahun 2010.

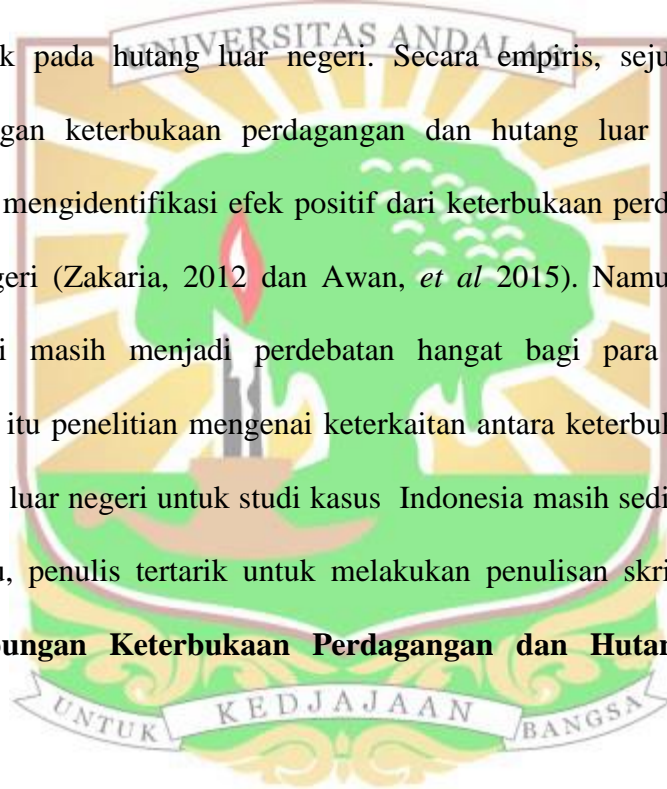
Menurut *Asian Development Bank* (ADB), keterbukaan perdagangan (*trade openness*) Indonesia mengalami perbaikan sejak tahun 2003. Meskipun kondisi keterbukaan perdagangan Indonesia menunjukkan trend yang positif dan Indonesia telah melunasi hutangnya kepada IMF, Indonesia masih memiliki sejumlah hutang luar negeri lainnya yang cenderung masih mengalami peningkatan hingga pada tahun 2013 jumlah hutang luar negeri Indonesia adalah sebesar 1.505 triliun rupiah. Hutang luar negeri Indonesia dari masa ke masa terus mengalami peningkatan.

Secara teori, keterbukaan perdagangan akan mempengaruhi hutang luar negeri meskipun tidak langsung. Dari persamaan identitas, ekspor neto (NX) dikatakan sebagai neraca perdagangan (*trade balance*), karena menunjukkan bagaimana perdagangan barang dan jasa melenceng dari tolak ukur kesamaan ekspor dan impor, yang secara tidak langsung juga akan menjadi tolak ukur keterbukaan perdagangan. Sementara *net capital flow* ($S - I$) merupakan jumlah dana yang dipinjamkan oleh penduduk domestik ke luar negeri dikurangi dengan jumlah dana yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Jika arus modal keluar neto kita positif, maka tabungan kita melebihi investasi dan kita meminjamkan kelebihanannya kepada pihak asing. Namun jika arus modal keluar neto kita negatif, perekonomian mengalami arus modal masuk: dan investasi melebihi tabungan, maka kondisi inilah yang menyebabkan kita melakukan pinjaman keluar negeri berupa hutang luar negeri.

Dari persamaan identitas pendapatan nasional, jika *net capital flow* dan ekspor neto adalah positif maka akan terjadi surplus pada perdagangan (*trade surplus*).keadaan ini menunjukkan bahwa suatu negara memberikan pinjaman kepada

negara lain dan ekspornya lebih banyak dari impor. Jika *net capital flow* dan ekspor neto adalah negatif, maka akan terjadi *trade deficit*. Hal ini berarti Negara tersebut harus melakukan hutang luar negeri dan lebih banyak mengimpor daripada mengekspor (Mankiw, 2008).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, keterbukaan perekonomian juga menggambarkan adanya keterbukaan pada perdagangan yang secara tidak langsung akan berdampak pada hutang luar negeri. Secara empiris, sejumlah studi telah meneliti hubungan keterbukaan perdagangan dan hutang luar negeri. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi efek positif dari keterbukaan perdagangan terhadap hutang luar negeri (Zakaria, 2012 dan Awan, *et al* 2015). Namun teori mengenai keterbukaan ini masih menjadi perdebatan hangat bagi para ekonom sampai sekarang. Selain itu penelitian mengenai keterkaitan antara keterbukaan perdagangan terhadap hutang luar negeri untuk studi kasus Indonesia masih sedikit yang meneliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Hubungan Keterbukaan Perdagangan dan Hutang Luar Negeri Indonesia”**



1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana hubungan keterbukaan perdagangan dan hutang luar negeri indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan keterbukaan perdagangan dan hutang luar negeri indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi sehingga mampu membuat kebijakan yang tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari enam bab.

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, serta analisis dan pembahasan mengenai : Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Terhadap Hutang Luar Negeri.

Bab II : Kerangka Teori Dan Kajian Pustaka



Kerangka teori dan kajian pustaka berisikan tentang studi pustaka terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari proses ini ditemukan kelemahan dan kelebihan penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut sekaligus menghindari duplikasi. Serta menjelaskan tentang teori - teori yang digunakan sebagai dasar penelitian sesuai masalah yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Berisikan tentang data - data penelitian, sumber data dan metode perhitungan serta model pengujian yang dilakukan terhadap data - data yang diperoleh.

Bab IV : Gambaran Umum

Membahas tentang perkembangan variabel-variabel yang terdapat pada model baik variabel dependen maupun independen.

Bab V : Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari hasil pengolahan data dan analisis hasil estimasi serta menginterpretasikan hasil yang didapat.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan skripsi, rekomendasi kebijakan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang diberikan oleh peneliti.

